

# **PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN SISTEM PELAPORAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Aprilia Bayan  
Asrudin Hormati  
Yustiana Djaelani

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara

[apriliabayan04@gmail.com](mailto:apriliabayan04@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, Kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan sistem pelaporan sebagai variabel moderasi (studi pada SKPD Kabupaten Pulau Morotai) Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui responden yang diperoleh dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden sebanyak 93 dan hanya 55 kuesioner yang kembali dan di analisis lebih lanjut. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Regresi Analisis Berganda dan Moderate Regression Analysis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sistem pelaporan dapat memoderasi hubungan antara pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**Kata Kunci :** Pengaruh komitmen organisasi, kejelasan anggaran dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan system pelaporan sebagai variable moderasi.

## **ABSTRACT**

*This research purpose to examine influence of Organizational commitment, Clarity of Budget Goals and Effectiveness of Internal Controls to Government Performance Accountability with Reporting System as Moderation Variable (Study on SKPD District of Morotai Island). The data used in this research is the primary data obtained by distributing of 93 questionnaires directly to respondents and only 55 questionnaires were returned and have further analyzed. This research used the multiple regression analysis and moderate regression analysis as the technique of data analysis to examine the hypothesis. Result of this research show that Organizational commitment, Clarity of Budget Goals and Effectiveness of Internal Controls influence to Government Performance Accountability. Reporting System can moderate the relationship between the influence of Organizational commitment ,Clarity of Budget Goals to Effectiveness of Internal Controls to Government Performance Accountability.*

**Key Words:** *Influence of Organizational commitment, Clarity of Budget Goals and Effectiveness of Internal Controls to Government Performance Accountability with Reporting System as Moderation Variable*

## PENDAHULUAN

Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Indra (2006) dalam Putra (2013) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Akuntabilitas merupakan istilah dari perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Primayoni (2014), akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Komitmen Organisasi merupakan tindak lanjut dari sebuah perencanaan matang dalam pengelolaan anggaran yang telah direncanakan dengan menghasilkan dampak yang memihak pada kepentingan organisasi publik. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif (Kurniawan, 2013).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah.

Pengendalian internal sangat menentukan baik atau buruknya kinerja pada suatu organisasi tersebut. Pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Yulianti dkk, 2014). Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Malut, dalam penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten morotai dari 2010-2016 masih memberikan hasil yang kurang baik. Dilihat dari opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morotai mulai 2010-2016.

Penelitian ini merupakan replikasi dari indrayani dkk, (2017) dengan judul "Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar) dan penelitian Herawaty (2011) dengan judul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini memodifikasi dari dua penelitian sebelumnya dengan sistem pelaporan sebagai variabel moderasi dari penelitian Herawaty (2011). Sedangkan judul penelitian yang saya ajukan adalah "**Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Sistem Pelaporan Sebagai Variabel Moderasi**" (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Pulau Morotai).

## KERANGKA TEORITIK

### Teori *Agency Theory*

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).

### Teori Kontijensi

Pendekatan kontijensi timbul sebagai pengaturan organisasi dimana pengendalian yang optimal itu dapat diterima pada semua pengaturan dan perusahaan sehingga organisasi dimana pengendalian dioperasikan. Suatu titik temu antara sistem pengendalian dan variabel kontijensi kontekstual dihipotesakan untuk

meningkatkan kinerja organisasi (individu). Teori kontijensi muncul sebagai jawaban atas pendekatan yang universal yang membantah bahwa desain pengendalian yang optimal dapat diterapkan dalam perusahaan secara keseluruhan. Teori kontijensi adalah teori kemungkinan variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja pencapaian tugas yang sangat menentukan pada gerak akselerasi pencapaian tujuan organisasi (Govindarajan, 1988).

Menurut Govindarajan (1988) diperlukan upaya untuk menjelaskan ketidak konsistenan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor kondisional antara kedua variabel tersebut dengan pendekatan kontijensi. Penggunaan pendekatan kontijensi tersebut memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel moderating atau variabel intervening yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen.

### **Stewardship theory**

Teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

### **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah performance yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Menurut Mahsun (2006) dalam Putra (2013) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk 5 pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab adan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006 dalam Putra, 2013).

### **Komitmen Organisasi**

Mowday et. al. (1982) dalam Putra (2013) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: *the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization*. Definisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberi kontribusi yang berarti pada organisasi.

Menurut Sopiah (2008) dalam Putra (2013) terdapat tiga komponen model dari komitmen organisasi.

#### 1. *Affective commitment*

Pengertian *affective commitment* difokuskan pada penggabungan emosional yang positif sebagai suatu bahagian dimana karyawan secara psikologis terkait dengan organisasi berdasarkan seberapa nyaman perasaannya dalam organisasi tersebut.

#### 2. *Continuance commitment*

Pengertian *continuance commitment* didasarkan pada keterkaitan dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi, sebagai bagian dimana karyawan secara psikologis terikat dengan organisasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan (ekonomi, sosial, dan hubungan status) jika ia meninggalkan organisasi. pekerjaan yang menjanjikan.

#### 3. *Normative commitment*

Yaitu adanya keinginan karyawan untuk tetap bersama organisasi berdasarkan kewajiban atas tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini bisa berasal dari budaya individual, etika kerja yang menyebabkan mereka wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kenis (2009) dalam Yulianti (2014) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Pelaksana anggaran akan menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja jika terdapat ketidakjelasan sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Menurut Dedi (2008) dalam Putra (2013) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Menurut Samuel (2008) dalam Putra (2013) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan

sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

### **Efektivitas Pengendalian Internal**

Tahun 1992 *committee of organization of the treadway commisson (COSO)* menyajikan model sistem komprehensif untuk struktur pengendalian intern yang ditetapkan pada tujuan pelaporan keuangan dan no-keuangan. COSO memperluas definisi *internal control* dengan istilah ' *Interal Contorl- Integrated Framework* ', yaitu proses yang didesain untuk mencapai tujuan: efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatutan kepada peraturan (*regulation*) dan hukum yang ditetapkan (Bastian, 2006).

### **Sistem Pelaporan**

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan, sistem pelaporan merupakan suatu sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan yang menggambarkan sistem pertanggung jawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepada bagian anggaran), yang di mana sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban (Suhaesti, 2016).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010). Laporan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang baik adalah yang mampu menyajikan informasi secara transparan dan akuntabel mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pemerintah daerah dalam suatu periode. Bentuk pelaporan keuangan daerah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang

digunakan saat ini ada 7 jenis, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Lebih Anggaran, Neraca, Laporan Operasional Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Pulau Morotai.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu pada 31 Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 1.333 dengan kriteria yaitu Esalon 2 (Kepala dinas), Esalon 3 (Kabag) dan Esalon 4 (Kasubag) . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative* Sugiyono (2010).

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **Model dan Analisis Data**

1. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Regresi Berganda *Moderate Regression Analysis (MRA)* untuk menguji hipotesis penelitian dengan bantuan program SPSS, persamaannya sebagai berikut :

$$AKP = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 +$$

$$e.....H_1, H_2 \text{ dan } H_3$$

$$AKP = a + b_1 x_1 + b_4 M + b_5 (x_1 * M) + e \dots \dots \dots H4$$

$$AKP = a + b_2 x_2 + b_5 M + b_6 (x_2 * M) + e \dots \dots \dots H5$$

$$AKP = a + b_3 x_3 + b_7 M + b_8 (x_3 * M) + e \dots \dots \dots H6$$

Keterangan :

AKPD = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

X1 = Komitmen Organisasi

X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X3 = Efektivitas Pengendalian Internal

M = Sistem Pelaporan

$\beta_0, \beta_4$  = Koefisien regresi

M1 = Interaksi antara Komitmen Organisasi dengan Sistem Pelaporan ( $X_1 * M$ )

M1 = Interaksi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Sistem Pelaporan ( $X_2 * M$ )

M1 = Interaksi antara Efektivitas Pengendalian Internal dengan Sistem Pelaporan ( $X_3 * M$ )

a = Konstanta

e = Standar Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan model analisis digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas yaitu pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah dengan menggunakan sistem pelaporan sebagai variabel moderasi. Adapun hasil dari regresi dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak disajikan pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Analisis Regresi

Variabel Penelitian	Analisis Regresi		
	Koefisien $\beta$	t hitung	Sig
<b>persamaan 1</b>			
Konstanta	15.348	4.686	0.000
X1	1.401	3.117	0.003
X2	0.019	-0.374	0.010
X3	0.944	-1.775	0.002
<b>persamaan 2</b>			
Konstanta	-1.347	-0.201	0.841
X1	0.252	-1.510	0.037
Z	2.342	8.642	0.000
M	0.003	-0.555	0.013
<b>persamaan 3</b>			
Konstanta	-5.887	-0.391	0.697
X2	0.202	0.678	0.008
Z	1.920	3.385	0.001
M	0.008	-0.701	0.009
<b>persamaan 4</b>			
Konstanta	0.543	0.080	0.937
X3	0.296	-1.449	0.005
Z	2.183	8.061	0.000
M	0.002	-0.307	0.006
<b>persamaan 1</b>	<b>persamaan 2</b>	<b>persamaan 3</b>	<b>Persamaan 4</b>
R Square	0.739	0.963	0.964
Adjust R Square	0.724	0.935	0.962
F hitung	48.052	473.785	261.501
Sig	0.000	0.000	452.681
$\alpha$	0.05	0.05	0.05
N	55	55	55

Sumber: Data primer diolah (2019)

$$Y = 15.348 + 1.401 (X_1) + 0.019 (X_2) + 0.944 (X_3) + e$$

Adapun membaca persamaan dari regresi di atas adalah:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 15.348 .
2. Pengaruh komitmen organisasi memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 1.401. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh koefisien regresi untuk variable pengaruh komitmen organisasi sebesar 1.401 dan nilai t hitung sebesar 3,177 dengan signifikan sebesar 0.003 yang nilai lebih kecil dari tingkat signifikan ( $\alpha$ )=5% atau 0,05 Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Kejelasan sasaran anggaran memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,019. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh koefisien regresi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,019 dan nilai t hitung sebesar -0.374 dengan signifikan sebesar 0,010 yang nilai lebih kecil dari tingkat signifikan ( $\alpha$ )=5% atau 0,05 Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
4. Efektivitas pengendalian internal memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,944. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, diperoleh koefisien regresi untuk variabel efektivitas pengendalian internal sebesar 0,944 dan nilai t hitung sebesar -1.775 dengan signifikan sebesar 0,002 yang nilai lebih kecil dari tingkat signifikan ( $\alpha$ )=5% atau 0,05 Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

$$Y = -1,347 + 0,252 (X_1) + 2,342 (M1) * - 0.003 (Z) + e$$

Interpretasi dari regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,347.
2. Interaksi antara sistem pelaporan dengan pengaruh komitmen organisasi memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu  $X_1$  sebesar 0,252. Sedangkan M1 sebesar 0.003 sedangkan Z sebesar 2,342. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9 diperoleh koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  sebesar 0,252 variabel M1 sebesar 0,003 dan  $Z_1$  sebesar 2,342 dengan nilai t hitung  $X_1$  sebesar -1,510 M1 sebesar 0,555 dan  $Z_1$  sebesar 28,642 dengan signifikan  $X_1$  sebesar 0,037 M1 sebesar 0,013 dan  $Z_1$  sebesar 0,000 yang nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan ( $\alpha$ )=5% atau 0,05 hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dapat memoderasi antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas kinerja pemerintah.

$$Y = -5,867 + 0,202 (X_2) + 0,008 (M2) * 1,920 (Z) + e$$

Interpretasi dari regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar -5867.
2. Interaksi antara sistem pelaporan dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu  $X_2$  sebesar 0,202. Sedangkan M1 sebesar 0.008 sedangkan Z sebesar 1,920. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 diperoleh koefisien regresi untuk variabel  $X_2$  sebesar 0,202 variabel M2 sebesar 0,008 dan  $Z_2$  sebesar 1,920 dengan nilai t hitung  $X_2$  sebesar 0,678 M2 sebesar -0,701 dan  $Z_2$  sebesar 3,365 dengan signifikan  $X_2$  sebesar 0,006 M2 sebesar 0,001 dan  $Z_2$  sebesar 0,009 yang nilai signifikan lebih kecil dari

tingkat signifikan ( $\alpha$ )=5% atau 0,05 hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dapat memoderasi antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas kinerja pemerintah.

$$Y = 0,543 + 0,296 (X_3) + 0,002 (M3) * 2,183 (Z) + e$$

Interpretasi dari regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,543 . Interaksi antara sistem pelaporan dengan pengaruh efektivitas pengendalian internal memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu  $X_3$  sebesar 0,296. Sedangkan M3 sebesar 0.002 sedangkan Z sebesar 2,183. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9 diperoleh koefisien regresi untuk variabel  $X_3$  sebesar 0,296 variabel M3 sebesar 0,002 dan  $Z_3$  sebesar 2,183 dengan nilai t hitung  $X_3$  sebesar -1,449 M3 sebesar -0,307 dan  $Z_3$  sebesar 8,061 dengan signifikan  $X_3$  sebesar 0,005 M3 sebesar 0,006 dan  $Z_3$  sebesar 0,000 yang nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan ( $\alpha$ )=5% atau 0,05 hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dapat memoderasi antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **Pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi merupakan peran penting dalam peningkatan kinerja pemerintah karena Komitmen yang tinggi menjadi individu lebih memperhatikan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Sebaliknya jika komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, komitmen organisasi

merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan *Nouri* dan *Parker* (1996), maka dengan adanya komitmen organisasi pemerintah dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan. Berdasarkan teori *stewardship* Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. menurut *Murwaningsari* (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target- target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks Pemerintah Daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya *Anjarwati* (2012).

### **Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah *Primayoni* (2014). Berdasarkan Teori kontigensi muncul sebagai jawaban atas pendekatan yang universal yang membantah bahwa desain pengendalian yang optimal dapat diterapkan dalam perusahaan secara keseluruhan.

### **Interaksi antara sistem pelaporan dan komitmen organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.**

Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa, variabel sistem pelaporan mampu memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Pulau Morotai. Karena komitmen sebagai suatu tujuan dan keinginan dalam sebuah organisasi yang di dalamnya tercakup unsur loyalitas dan integritas, sehingga pemerintah daerah berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan seluruh amanah yang dapat dipertanggung jawabkan melalui suatu sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan yang menggambarkan sistem pertanggung jawaban dari bawahan



(pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepada bagian anggaran), yang di mana sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Ini berarti variable system pelaporan merupakan variable pemoderasi dalam hubungan antara komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten pulau morotai.

### **Interaksi antara sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.**

Hasil pengujian hipotesis kelima menemukan bahwa, variabel sistem pelaporan mampu memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Pulau Morotai. Dimana Kejelasan sasaran anggaran adalah suatu proses kerja organisasi yang dinilai baik secara finansial, jelas akan memudahkan untuk menyusun target-target anggaran. Sistem pelaporan merupakan suatu bagian yang dapat mempermudah pembuatan penyusunan laporan anggaran oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, Keterlibatan individu dalam proses penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran anggaran yang disusun untuk mencapai Akuntabilitas, karena penyusunan laporan Kinerja Pemerintah merupakan laporan yang wajib disusun oleh instansi Pemerintah dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, yang dicapai. berarti variable system pelaporan merupakan variable pemoderasi dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada SKPD kabupaten pulau morotai.

### **Interaksi antara sistem pelaporan dan Efektivitas Pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.**

Hasil pengujian hipotesis keenam menemukan bahwa, variabel sistem pelaporan mampu memoderasi hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Pulau Morotai. Efektivitas Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Efektivitas pengendalian internal dilakukan untuk menjaga agar aktivitas organisasi tetap mengarah kepada tujuan organisasi semula yang dapat mendorong manajer untuk membuat keputusan yang tepat pada tujuan sehingga berpengaruh kepada sistem pelaporan.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
4. Sistem pelaporan memoderasi hubungan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
5. Sistem pelaporan memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Sistem pelaporan memoderasi hubungan efektivitas pengendalian internal.

#### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha untuk merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.
2. Data yang dianalisis menggunakan instrument yang berdasarkan persepsi jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya.

#### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini:

1. Bagi SKPD Kabupaten Pulau Morotai diharapkan lebih meningkatkan komitmen organisasinya, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi peneliti berikutnya yang memang tertarik untuk melakukan penelitian seperti ini, diharapkan agar bisa menambah variabel yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas wilayah atau diluar dari Kabupaten Pulau Morotai.
4. Peneliti diharapkan sebelum menentukan variabel moderasi sebaiknya mencari jurnal terdahulu agar mempermudah dalam penyusunan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Hilmi. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta). *Kompak*, No 13:37-67.
- Adi, Asdita Wayan I,I Made Sdha Suardika,I G.M. Asri Dwija Putri. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Pengguna Simda Pada Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Ekonomi*, Universitas Udayana, Bali.
- Afrina, Dina. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Journal of Manajemen*, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Anjarwati, Mei. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal Vol 1 No.2*.
- Arens, Alvin A. dkk. 2006. *Auditing dan Jasa Assurance*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Arifin,W. Beny. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Vol.13.No.1.)
- Arum, N. S. 2016. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Studi Pada Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota).

- Jurnal Akuntansi dan Bisnis*: Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi sektor publik di Indonesia. Edisi Pertama. Fakultas Ekonomika Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Cefrida S, Mentari. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Pekanbaru, 1(2)
- Deby, ayu. 2016. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Universitas Sumatra Utara Kabupaten Langkat
- Dewi, dkk. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Gianyar dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana, Bali.
- Faristina, Rosalin. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang. *Skripsi*, Universitas Diponegoro : Semarang. (Tidak dipublikasi)
- Fauzan, Reyhan Hady. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal ekonomi*, Universitas Riau: Pekanbaru.
- Govindarajan, V. 1986. *Impact of participation in the budgetary process on Managerial attitudes and performance* *Universalistic and Contingency perspectives*. *Strategic Management Journal in press*.
- Herawaty, Netty. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi". Simposium Nasional Akuntansi Vol. 13. *Jambi*.
- Indudewi, Dian. 2009. Pengaruh Sasaran Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi dan Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Organisasi, *Tesis S-2*, Universitas Diponegoro Semarang: Diunduh dari: Perustakaan elektronik UNDIP: <http://www.eprints.undip.ac.id>
- Indrayani, Luh Febri, Putu Gede Diatmika, Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *Jurnal akuntansi*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Istiyani. 2011. "Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)". *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol 7 No 1. Universitas Surakarta.
- Ivano, Yudha. 2009. Pengaruh Motivasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pertanahan BPN Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kaltsum, Ummu. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

- Salatiga. *Journal Of Accounting*, Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, Muhammad. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Kerinci). *Artikel Ilmiah*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. UPP. STMYKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Michael C. Jensen, William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Nouri, H. dan R. J. Parker. 1996. "The Effect of Organizational Commitment and Relation Between Budgetary Participation and Budgetary Slack". *Behavior Research in Accounting* 8. Hal 74-89
- Nuraini, Indudewi. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes. Skripsi. Universitas Semarang.
- Prasetyo, Aji. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang.
- Primayoni, Ni Kadek Rina. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Klungkung). *Skripsi*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Purnawati, Anggit. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegah Fraud (Survey Pada Rumah Sakit Bandung).
- Putra, Deki. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Artikel akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Putri, Gustika Yolanda. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Riantiarno, Azlina, 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( studi pada Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal online*. Universitas Riau.
- Riduwan. 2012. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Cetakan kesembilan. Alfabeta: Bandung.
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Rohman, Abdul,. Ummu, Kaltsum. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 2337-3806 : 1- 14
- Sardi. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar Bmkg Wilayah Iii Denpasar-Bali). *Jurnal Infestasi Akuntansi*. Universitas Matarm, NTB. ( Vol. 12, No.2).
- Sari.2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Daerah Kabupaten Rokan Hulu).
- Setiawan, Eko. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional. Yogyakarta: *PT. Andi*
- Silalahi, Edipson Bayer. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Suhaesti, Siti Ruri. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Journal of manajemen*, Universitas Riau, Pekanbaru. Vol.3.No.1.
- Sugiyono. 2010. Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Tresnawati, Rina. 2011. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Bandung.
- Wahid, Imam. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Journal Of Manajemen*.Fakultas Ekonomi, Universitas Riu: Pekanbaru.(Vol.3.No.1)
- Wahyuni. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Skripsi*. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Wirnipin, Sri Komang. 2015. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja.
- Yulianti, Reni. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). *Journal of manajemen*. Universitas Riau.Vol.1.No.2.
- <https://www.suara.com/bisnis/2016/08/09/111949/bidik-target-rp2511-miliar-laba-asdp-ternate-terus-meroket>. Diunduh tanggal 5 Desember 2018.